



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II 2026



Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II 2026



Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II (April - Juni 2026) di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua II dapat diselesaikan dengan baik.

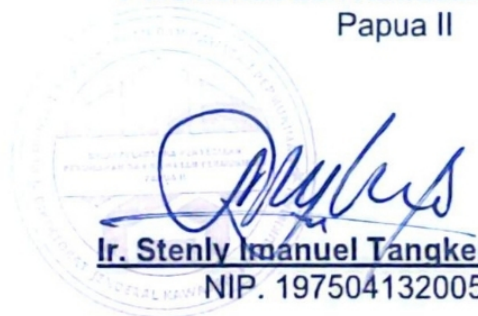
Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menerapkan sistem kerja yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan sistem perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan SAKIP.

Laporan Triwulan ini memuat uraian mengenai target pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan, capaian kinerja program dan kegiatan, permasalahan yang dihadapi beserta rencana tindak lanjut, serta kesimpulan dan saran. Diharapkan laporan ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan selanjutnya.

Dalam penyusunan dan penyajian laporan ini, kami menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dan kekurangan yang memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan laporan pada periode selanjutnya. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Triwulan II Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Tahun 2026, diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja serta akuntabilitas di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II.

Manokwari, 10 Juli 2026

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Papua II



Ir. Stenly Imanuel Tangkere, S.T., M.A.P.
NIP. 197504132005011010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tugas dan Fungsi	2
I.3 Struktur Organisasi	3
BAB II CAPAIAN KINERJA	5
II.1 Target Kinerja Triwulan II berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja	5
II.2 Capaian Target Triwulan	5
II.3 Permasalahan/Potensi Capaian Triwulan	15
BAB III PENUTUP.....	17
III.1 Rencana Tindak Lanjut	17
III.2 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Kinerja Balai P3KP Papua II.....	6
Tabel 2. Target Kinerja Satker PKP Provinsi Papua Barat.....	9
Tabel 3. Capaian Target Kinerja BP3KP Papua II	10
Tabel 4. Capaian Target Kinerja Satker PKP Papua Barat	13
Tabel 5. Rencana Tindak Lanjut	17
Tabel 6. Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai P3KP Papua II.....	3
Gambar 2. Struktur Organisasi Satker PKP Provinsi Papua Barat	4

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perumahan merupakan hak dasar setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya hak tersebut melalui penyediaan akses hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang penting dalam membentuk kehidupan masyarakat yang bermartabat, aman, damai, dan nyaman.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pembangunan perumahan bertujuan untuk menjamin setiap warga negara dapat menghuni rumah yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, terencana, terintegrasi, serta berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, diperlukan penerapan prinsip pembangunan yang seimbang antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang diperkuat oleh dimensi kelembagaan. Prinsip tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Selain itu, pengarusutamaan gender menjadi strategi penting dalam memastikan seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta masyarakat berpenghasilan rendah, memperoleh akses, partisipasi, dan manfaat yang setara dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam konteks tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II berkomitmen untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian kinerja Balai Pelaksana

Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II pada Program Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman menunjukkan hasil yang sangat baik, ditandai dengan terpenuhinya seluruh target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berbagai kegiatan, antara lain Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan dan pemeliharaan rumah susun, penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta dukungan manajemen dan tata kelola organisasi, telah berhasil direalisasikan secara optimal. Keberhasilan tersebut didukung oleh koordinasi yang intensif, pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi secara berkelanjutan, serta komitmen terhadap prinsip transparansi, integritas, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan.

I.2 Tugas dan Fungsi

I.2.1 Tugas Balai P3KP Papua II

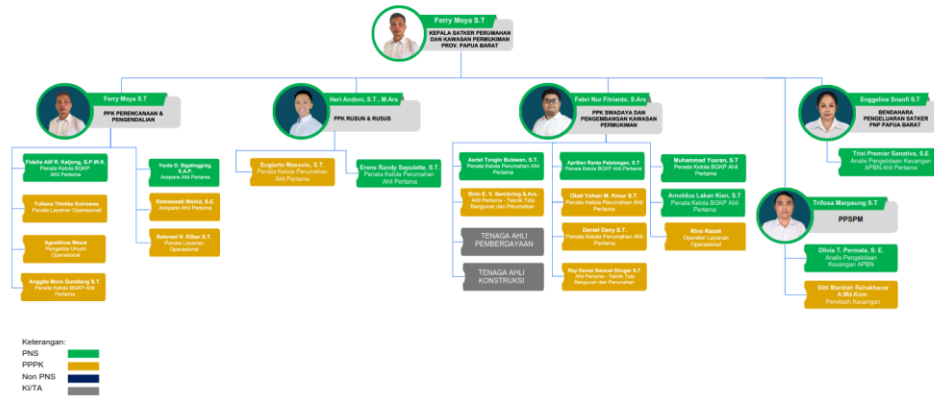
Balai P3KP Papua II memiliki tugas dan fungsi yang mengacu pada Permen PKP No. 1 Tahun 2025, dimana Balai P3KP Papua II termasuk kedalam Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas II yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pascabencana dan pascakerusuhan sosial, serta fasilitasi serah terima aset.

I.2.2 Fungsi Balai P3KP Papua II

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan.
2. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
3. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
4. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;

Struktur Organisasi
Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat



Gambar 2. Struktur Organisasi Satker PKP Provinsi Papua Barat

BAB II

CAPAIAN KINERJA

II.1 Target Kinerja Triwulan II berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja

Target Kinerja Triwulan II disusun berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja BP3KP Papua II. Dokumen Rencana Aksi Kinerja tersebut ditetapkan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) Awal Tahun Anggaran 2026 antara Kepala BP3KP Papua II dan masing-masing Direktur Jenderal, yang bersumber dari 5 (lima) Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu DIPA Sekretariat Jenderal, DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, serta DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Adapun Target Kinerja Triwulan II pada BP3KP Papua II dapat dilihat pada Tabel 1.

II.2 Capaian Target Triwulan

Berdasarkan Rencana Aksi Kinerja Tahun Anggaran 2026, capaian kinerja Triwulan II (April – Juni 2026) Balai P3KP Papua II dan Satuan Kerja PKP Papua Barat menunjukkan bahwa realisasi keuangan Balai P3KP Papua II mencapai 45,69%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 48,40%. Namun demikian, realisasi fisik baru mencapai 45,69% dari target 48,80%. Sementara itu, Satuan Kerja PKP Papua Barat mencatat realisasi keuangan sebesar 12,56% dari target 35%, dengan realisasi fisik sebesar 9,64% dari target 40%.

Secara umum, capaian tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Kondisi ini terutama disebabkan oleh belum dimulainya pelaksanaan kegiatan fisik, sehingga penyerapan anggaran masih relatif rendah dan belum optimal. Meskipun demikian, sejumlah tahapan persiapan program telah dilaksanakan, antara lain proses seleksi dan rekrutmen tenaga fasilitator serta verifikasi teknis Program BSPS Tahun Anggaran 2026. Selain itu, untuk kegiatan PSU telah dilaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi teknis lapangan sebagai bagian dari tahapan awal pelaksanaan program.

Tabel 1. Target Kinerja Balai P3KP Papua II

INDIKATOR KINERJA		Target PK	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)							
			TW I		TW II		TW III		TW IV	
			KEU	FIS	KEU	FIS	KEU	FIS	KEU	FIS
SEKRETARIAT JENDERAL										
SK-1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal									
1	Jumlah Layanan Umum	Layanan	24	24	50	50	84	84	100	100
2	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	24	24	50	50	84	84	100	100
3	Jumlah Layanan Sarana Internal	Unit	24	24	50	50	84	84	100	100
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN										
SK-1	Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni									
1	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	16	16	50	50	79	79	100	100
2	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	16	16	50	50	79	79	100	100
SK-2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman									
1	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen	16	16	50	50	79	79	100	100
SK-3	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman									
1	Jumlah Layanan Umum	Layanan	16	16	50	50	79	79	100	100
2	Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	16	16	50	50	79	79	100	100
3	Jumlah Layanan BMN	Layanan	16	16	50	50	79	79	100	100
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN										
SK-1	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan									
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	19	19	52	52	78	78	100	100

INDIKATOR KINERJA		Target PK	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)							
			TW I		TW II		TW III		TW IV	
			KEU	FIS	KEU	FIS	KEU	FIS	KEU	FIS
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Laporan	19	19	52	52	78	78	100	100
SK-2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan									
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	19	19	52	52	78	78	100	100
SK-3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan									
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	19	19	52	52	78	78	100	100
SK-4	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan									
1	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Dokumen	19	19	52	52	78	78	100	100
SK-5	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan									
1	Jumlah Layanan Umum	Layanan	19	19	52	52	78	78	100	100
SK-6	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan									
1	Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	19	19	52	52	78	78	100	100
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN										
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan									
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	18	18	45	45	72	72	100	100
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	18	18	45	45	72	72	100	100
SK-2	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan									
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	18	18	45	45	72	72	100	100

INDIKATOR KINERJA		Target PK	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)							
			TW I		TW II		TW III		TW IV	
			KEU	FIS	KEU	FIS	KEU	FIS	KEU	FIS
SK-3	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan									
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	18	18	45	45	72	72	100	100
SK-4	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan									
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	18	18	45	45	72	72	100	100
SK-5	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan									
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	18	18	45	45	72	72	100	100
SK-6	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan									
1	Jumlah Layanan Umum	Layanan	18	18	45	45	72	72	100	100
2	Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	18	18	45	45	72	72	100	100
3	Jumlah Layanan BMN	Layanan	18	18	45	45	72	72	100	100
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN										
SK-1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel									
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	15	15	58	58	80	80	100	100
SK-2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman									
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	15	15	58	58	80	80	100	100
SK-3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman									
1	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	Rekomendasi Kebijakan	15	15	58	58	80	80	100	100

Tabel 2. Target Kinerja Satker PKP Provinsi Papua Barat

INDIKATOR KINERJA		TARGET PK	AKTIVITAS	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)							
				TW I		TW II		TW III		TW IV	
				KEU	FIS	KEU	FIS	KEU	FIS	KEU	FIS
SEKRETARIAT JENDERAL											
SK-1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal										
1	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	Melaksanakan layanan umum	10	15	35	40	70	75	100	100
2	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	Melaksanakan layanan perkantoran	10	15	35	40	70	75	100	100
3	Jumlah Layanan Sarana Internal	1 Unit	Melaksanakan layanan sarana internal	10	15	35	40	70	75	100	100
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN											
SK-1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Kawasan Permukiman										
1	Jumlah Unit Rumah Swadaya Melalui Peningkatan Kualitas	2400 Unit	Menyelesaikan Program BSPS	10	15	35	40	70	75	100	100
SK-2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman										
1	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	Melaksanakan layanan umum	10	15	35	40	70	75	100	100
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN											
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan										
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	Menyusun Laporan Pemantauan dan Evaluasi	10	15	35	40	70	75	100	100
2	Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	900 Unit	Menyelesaikan Program BSPS	10	15	35	40	70	75	100	100
SK-2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan										
1	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	Melaksanakan Layanan Umum	10	15	35	40	70	75	100	100

INDIKATOR KINERJA		TARGET PK	AKTIVITAS	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)							
				TW I		TW II		TW III		TW IV	
				KEU	FIS	KEU	FIS	KEU	FIS	KEU	FIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKOTAAN											
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan										
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	Menyusun Laporan Pemantauan dan Evaluasi	10	15	35	40	70	75	100	100
2	Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	600 Unit	Menyelesaikan Program BSPS	10	15	35	40	70	75	100	100
SK-2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan										
1	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	Melaksanakan Layanan Umum	10	15	35	40	70	75	100	100

Tabel 3. Capaian Target Kinerja Balai P3KP Papua II

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu	Realisasi	Keuangan (%)		Fisik (%)	
				(Rp)	(Rp)	RN	RL	RN	RL
SEKRETARIAT JENDERAL									
Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal				1.284.829.000	578.026.510	50	44,99	50	44,99
SK-1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal								
1	Jumlah Layanan Umum	1	Layanan	72.628.000	66.383.428	50	91,40	50	91,40
2	Jumlah Layanan Perkantoran	1	Layanan	1.162.712.000	511.643.082	50	44,00	50	44,00
3	Jumlah Layanan Sarana Internal	1	Unit	49.489.000	0	50	0,00	50	0,00
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN									
Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman				283.186.000	121.584.499	50	42,93	50	42,93
SK-1	Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni								
1	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1	Dokumen	43.281.000	4.138.000	50	9,56	50	9,56
2	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Rekomendasi Kebijakan	78.282.000	23.071.279	50	29,47	50	29,47
SK-2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman								

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu	Realisasi	Keuangan (%)		Fisik (%)	
				(Rp)	(Rp)	RN	RL	RN	RL
1	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1	Dokumen	71.365.000	51.720.180	50	72,47	50	72,47
SK-3	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman								
1	Jumlah Layanan Umum	1	Layanan	57.684.000	32.146.840	50	55,73	50	55,73
2	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	10.788.000	1.910.000	50	17,70	50	17,70
3	Jumlah Layanan BMN	1	Layanan	21.786.000	8.598.200	50	39,47	50	39,47
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN									
Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				216.484.000	68.188.938	52	31,50	52	31,50
SK-1	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1	Rekomendasi Kebijakan	17.970.000	6.450.000	52	35,89	52	35,89
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1	Laporan	18.068.000	3.593.000	52	19,89	52	19,89
SK-2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1	Rekomendasi Kebijakan	47.404.000	19.252.832	52	40,61	52	40,61
SK-3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Rekomendasi Kebijakan	60.049.000	32.358.106	52	53,89	52	53,89
SK-4	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan								
1	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Dokumen	43.799.000	3.455.000	52	7,89	52	7,89
SK-5	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan								
1	Jumlah Layanan Umum	1	Layanan	16.365.000	3.080.000	52	18,82	52	18,82
SK-6	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan								
1	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	12.829.000	0	52	0,00	52	0
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN									
Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan				289.393.000	183.075.793	45	63,26	45	63,26
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan	42.225.000	23.409.000	45	55,44	45	55,44
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Laporan	44.292.000	33.813.144	45	76,34	45	76,34
SK-2	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan	29.719.000	26.284.000	45	88,44	45	88,44

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu	Realisasi	Keuangan (%)		Fisik (%)	
				(Rp)	(Rp)	RN	RL	RN	RL
SK-3	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan	27.900.000	22.059.115	45	79,06	45	79,06
SK-4	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan	40.934.000	31.541.334	45	77,05	45	77,05
SK-5	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan	60.151.000	34.214.000	45	56,88	45	56,88
SK-6	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan								
1	Jumlah Layanan Umum	1	Layanan	14.445.000	7.435.200	45	51,47	45	51,47
2	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	14.925.000	4.320.000	45	28,94	45	28,94
3	Jumlah Layanan BMN	1	Layanan	14.802.000	0	45	0,00	45	0
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO									
Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman				62.842.000	25.298.700	45	40,26	45	40,26
SK-1	Meningkatnya Dukungan Kebijakan Keterbukaan Publik Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efektif dan Akuntabel								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1	Rekomendasi Kebijakan	18.051.000	7.971.900	45	44,16	45	44,16
SK-2	Meningkatnya Dukungan Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	2	Rekomendasi Kebijakan	29.436.000	11.456.000	45	38,92	45	38,92
SK-3	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman								
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	1	Rekomendasi Kebijakan	15.355.000	5.870.800	45	38,23	45	38,23
Total				2.136.734.000	976.174.440	48,40	45,69	48,40	45,69

Tabel 4. Capaian Target Kinerja Satker PKP Papua Barat

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
						RN	RL	RN	RL
SEKRETARIAT JENDERAL									
Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal				697.092.000	492.424.584	35	70,64	40	53,53
SK-1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal								
1	Jumlah Layanan Umum	1	Layanan	26.121.000	21.829.189	35	83,57	40	40,00
2	Jumlah Layanan Perkantoran	1	Layanan	637.978.000	470.595.395	35	73,76	40	56,08
3	Jumlah Layanan Sarana Internal	1	Unit	32.993.000	0	35	0	40	15,00
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN									
Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman				71.278.692.000	8.409.987.263	35	11,80	40	11,76
SK-1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Kawasan Permukiman								
1	Jumlah Unit Rumah Swadaya Melalui Peningkatan Kualitas	2400	Unit	71.203.379.000	8.348.552.752	35	11,72	40	11,73
SK-2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman								
1	Jumlah Layanan Umum	1	Layanan	75.313.000	61.434.511	35	81,57	40	45,00
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN									
Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				27.272.227.000	4.936.212.098	35	18,10	40	4,31
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan								
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Laporan	39.624.000	30.862.018	35	77,89	40	44,80
2	Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	900	Unit	27.226.126.000	4.905.350.080	35	18,02	40	4,24
SK-2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan								
1	Jumlah Layanan Umum	1	Layanan	6.477.000	0	35	0,00	40	48,00
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN									
Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan				36.385.775.000	3.198.975.740	35	8,79	40	8,61
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan								
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Laporan	18.404.000	6.751.000	35	36,68	40	37,00

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
						RN	RL	RN	RL
2	Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	15	Hektar	9.289.119.000	242.300.607	35	2,61	40	1,94
3	Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	800	Unit	24.686.415.000	2.923.934.133	35	11,84	40	11,93
4	Jumlah Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perkotaan	200	Hektar	2.385.000.000	23.900.000	35	1,00	40	0
SK-2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.								
1	Jumlah Layanan Umum	1	Layanan	6.837.000	2.090.000	35	30,57	40	31,00
TOTAL				135.633.786.000	17.037.599.685	35	12,56	40	9,64

II.3 Permasalahan/Potensi Capaian Triwulan

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara umum capaian target kinerja yang mengacu pada Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Tahun 2026 pada Triwulan II telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya percepatan pelaksanaan, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta mitigasi terhadap berbagai kendala teknis guna memastikan seluruh target kinerja dapat dicapai secara optimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa permasalahan, khususnya pada paket-paket pekerjaan fisik selama Triwulan II, yang perlu menjadi perhatian, yaitu sebagai berikut.

II.3.1 PPK Balai

1. Belum tersedianya alokasi anggaran untuk pengembangan *website* Klinik PKP.
2. Adanya keterbatasan alokasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
3. Petugas Klinik PKP BP3KP Papua II masih merangkap tugas dalam kegiatan verifikasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sehingga pelaksanaan layanan Klinik PKP belum dapat dilakukan secara optimal.
4. Terjadi perubahan Pejabat Penandatanganan Perjanjian Kinerja (Kepala Balai) pada Perjanjian Kinerja Awal yang meliputi Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, dan Direktorat Jenderal Perkotaan, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap dokumen administrasi dan proses pengesahannya.

II.3.2 PPK Perencanaan dan Pengendalian

- a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
 - Perubahan Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dan Direktorat Jenderal Perkotaan, dan Pergantian Kepala Balai P3KP Papua II.
- b. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga(RKA/KL)
 - Terdapat revisi pemotongan anggaran di 3 DIPA (KP, Perdesaan, Perkotaan), dan revisi POK dan RPD (Rencana Penarikan Dana) pada 4 DIPA Satker
- c. Barang Milik Negara (BMN)
 - Dokumen Serah Terima Penghunian dan Serah Terima Aset Rumah Susun ASN Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya belum sepenuhnya lengkap sehingga masih memerlukan penyelesaian administrasi.

- Surat Kesediaan Menerima Hibah dari penerima bantuan eks-DJP perlu dilakukan penandatanganan kembali sebagai penyesuaian terhadap perubahan tujuan hibah kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

II.3.2 PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus

1. Kelengkapan dokumen penghunian Rumah Susun ASN PUPR dan Rumah Susun ASN Pemprov Papua Barat Daya belum dilengkapi oleh penerima bantuan/pengguna, sehingga Rumah Susun belum terhuni.

II.3.3 PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman

- a. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
 - Instruksi Verifikasi Tahap I, II, III, dan V mencakup sebanyak 1.816 BNBA. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.374 BNBA telah selesai dilakukan verifikasi teknis lapangan (vertek), sebanyak 309 BNBA masih dalam proses verifikasi, sehingga total capaian verifikasi mencapai 1.683 BNBA. Namun demikian, data yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) baru mencapai 466 BNBA (Tahap I sebanyak 156 BNBA, Tahap II sebanyak 99 BNBA, dan Tahap III sebanyak 211 BNBA) atau sebesar 25,66% dari total 1.816 BNBA. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian validasi data belum optimal karena masih terdapat data yang terindikasi sebagai *dummy*.
 - Dari total 4.340 Calon Penerima Bantuan (CPB) yang diinstruksikan untuk dilakukan verifikasi, hanya sebanyak 1.190 CPB yang direkomendasikan sebagai calon penerima Program BSPS.
- b. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
 - Masih terdapat ketidaksesuaian persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 02/DT/2025 pada Perumahan Soribo Gunung, antara lain Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi yang telah berakhir masa berlakunya serta daftar tahun akad yang belum dilengkapi secara keseluruhan.
- c. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
 - Terdapat revisi terhadap *Detailed Engineering Design* (DED) yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah sehingga memerlukan penyesuaian pada dokumen perencanaan.
 - Penyusunan dokumen reviu DED untuk penanganan kawasan permukiman kumuh oleh konsultan mengalami keterlambatan sehingga berdampak pada jadwal pelaksanaan kegiatan.

BAB III PENUTUP

III.1 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan penjabaran permasalahan yang terjadi dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua II, selanjutnya disusun rencana tindak lanjut sebagai berikut:

Tabel 5. Rencana Tindak Lanjut

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
PPK PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN		
1	Belum tersedianya alokasi anggaran untuk pengembangan <i>website</i> Klinik PKP.	Mengajukan usulan penambahan alokasi anggaran untuk pengembangan <i>website</i> Klinik PKP.
2	Adanya keterbatasan alokasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.	Mengajukan usulan penambahan alokasi anggaran guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja.
3	Petugas Klinik PKP BP3KP Papua II masih merangkap tugas dalam kegiatan verifikasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sehingga pelaksanaan layanan Klinik PKP belum dapat dilakukan secara optimal.	Mengoptimalkan penyelenggaraan layanan Klinik PKP untuk memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
4	Terjadi perubahan Pejabat Penandatangan Perjanjian Kinerja (Kepala Balai) pada Perjanjian Kinerja Awal yang meliputi Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, dan Direktorat Jenderal Perkotaan, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap dokumen administrasi dan proses pengesahannya.	Melakukan konfirmasi terkait penandatanganan ulang dokumen Perjanjian Kinerja oleh Kepala Balai, Ir. Stenly Imanuel Tangkere, S.T., M.A.P., sebagai tindak lanjut atas perubahan Pejabat Penandatangan Perjanjian Kinerja.
PPK PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN		
LAKIP		
1	Perubahan Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dan Direktorat Jenderal Perkotaan	Perjanjian Kinerja Awal menggunakan DIPA Revisi 01.
2	Pergantian Kepala Balai P3KP Papua II	Konfirmasi untuk penandatanganan ulang dokumen Perjanjian Kinerja oleh Kabalai (Ir. Stenly Imanuel Tangkere, S.T., M.A.P.) dan Kasatker (Ir. Ferry Moya, S.T.)

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
RKA K/L		
1	Terdapat revisi pemotongan anggaran di 3 DIPA (Kawasan Permukiman, Perdesaan, Perkotaan)	Telah dilakukan revisi dan pengiputan pada SAKTI 3 DIPA (Kawasan Permukiman, Perdesaan, Perkotaan)
2	Terdapat revisi POK dan RPD (Rencana Penarikan Dana) pada 4 DIPA Satker	Telah dilakukan revisi dan pengiputan pada SAKTI POK dan RPD (Rencana Penarikan Dana) pada 4 DIPA Satker
BMN		
1	Dokumen Serah Terima penghunian dan Serah Terima Aset Rumah Susun ASN Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang belum lengkap.	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Percepatan Penghunian dan Serah Terima Aset Rumah Susun ASN Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
2	Surat Kesediaan Menerima Hibah dari Penerima Batuan Eks. DJP harus di tanda tangan ulang dengan tujuan Hibah kepada Kementerian PKP.	Menunggu surat dari Sekjen terkait permintaan SKM dari Kementerian PKP sebagai dasar pengajuan tanda tangan ulang ke Penerima Hibah/ Pemda serta menunggu arahan dari pimpinan Kasatker tuk menindaklanjuti surat tersebut.
PPK RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS		
1	Kelengkapan dokumen penghunian Rumah Susun ASN PUPR belum dilengkapi oleh user, sehingga Rumah Susun belum terhuri.	Balai sudah bersurat ke Kepala Balai BWS Wilayah Papua Barat untuk segera melengkapi dokumen, deadline 6 Mei 2026;
2	Kelengkapan dokumen penghunian Rumah Susun ASN Pemprov PBD belum dilengkapi oleh user, sehingga Rumah Susun belum terhuri.	Balai sudah bersurat ke Gubernur Provinsi Papua Barat Daya untuk segera melengkapi dokumen, deadline 6 Mei 2026.
PPK RUMAH SWADAYA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN		
BSPS		
1	Instruksi Verifikasi Tahap I, II, III, dan V mencakup sebanyak 1.816 BNBA. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.374 BNBA telah selesai dilakukan verifikasi teknis lapangan (vertek), sebanyak 309 BNBA masih dalam proses verifikasi, sehingga total capaian verifikasi mencapai 1.683 BNBA. Namun demikian, data yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) baru mencapai 466 BNBA (Tahap I sebanyak 156 BNBA, Tahap II sebanyak 99 BNBA, dan Tahap III sebanyak 211 BNBA) atau sebesar 25,66% dari total 1.816 BNBA. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian validasi data belum optimal karena masih terdapat data yang terindikasi sebagai dummy.	Mendorong penguatan sinergi dan koordinasi di tingkat kabupaten/kota, khususnya antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Dinas Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS), guna memperoleh data yang valid serta mempercepat penyelesaian verifikasi teknis lapangan (vertek). Upaya tersebut didukung melalui pelaksanaan rapat internal mingguan untuk mengekspos hasil vertek, rapat koordinasi mingguan bersama Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Koordinator Kabupaten (Korkab), serta evaluasi kinerja secara berkala guna memastikan pencapaian target pelaksanaan kegiatan.
2	Data CPB yang direkomendasikan untuk program BSPS hanya 1.190 dari total instruksi verifikasi sebanyak 4.340 CPB.	Berkoordinasi dengan pengusul terkait pemenuhan alokasi instruksi verifikasi.

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
PSU		
1	Terdapat ketidaksesuaian dalam persyaratan administrasi sesuai dengan SE no 02/DT/ 2025 pada perumahan Soribo Gunung yaitu SBU jasa Konstruksi yang sudah habis masa berlakunya, daftar tahun akad yang belum lengkap.	Terus menginstruksikan pengembang untuk melengkapi dokumen administrasi yang belum lengkap pada Perumahan Soribo Gunung.
PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH		
1	Revisi DED usulan Pemda.	Mengarahkan dinas melakukan revisi sesuai Juknis.
2	Adanya keterlambatan penyusunan dokumen reviu DED penanganan kawasan kumuh oleh konsultan.	Pemberian surat peringatan kepada konsultan reviu DED.

III.2 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya

Tabel 6. Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya

Triwulan I				Triwulan II		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
PPK BALAI						
-	-	-	-	1	Belum tersedianya alokasi anggaran untuk pengembangan <i>website</i> Klinik PKP.	Mengajukan usulan penambahan alokasi anggaran untuk pengembangan <i>website</i> Klinik PKP.
-	-	-	-	2	Adanya keterbatasan alokasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.	Mengajukan usulan penambahan alokasi anggaran guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja.
-	-	-	-	3	Petugas Klinik PKP BP3KP Papua II masih merangkap tugas dalam kegiatan verifikasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sehingga pelaksanaan layanan Klinik PKP belum dapat dilakukan secara optimal.	Mengoptimalkan penyelenggaraan layanan Klinik PKP untuk memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
-	-	-	-	4	Terjadi perubahan Pejabat Penandatangan Perjanjian Kinerja (Kepala Balai) pada Perjanjian Kinerja Awal yang meliputi Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, dan Direktorat Jenderal Perkotaan, sehingga diperlukan penyesuaian	Melakukan konfirmasi terkait penandatanganan ulang dokumen Perjanjian Kinerja oleh Kepala Balai, Ir. Stenly Imanuel Tangkere, S.T., M.A.P., sebagai tindak lanjut atas perubahan Pejabat Penandatangan Perjanjian Kinerja.

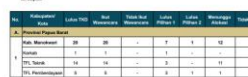
Triwulan I				Triwulan II		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
					terhadap dokumen administrasi dan proses pengesahannya.	
PPK PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN						
LAKIP						
1	Perubahan Dokumen Perjanjian Kinerja Revisi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dan Direktorat Jenderal Perkotaan	Telah dilakukan perbaikan dokumen Perjanjian Kinerja Revisi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dan Direktorat Jenderal Perkotaan dengan menggunakan DIPA Revisi 02, dan sudah di tandatangan oleh Kabalai P3KP Papua II dan Kasatker PKP Provinsi Papua Barat	Dokumen Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dan Direktorat Jenderal Perkotaan sudah ditandatangani dan dicetak oleh Kabalai P3KP Papua II dan Kasatker PKP Provinsi Papua Barat	1	Perubahan Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dan Direktorat Jenderal Perkotaan	Perjanjian Kinerja Awal menggunakan DIPA Revisi 01;
-	-	-	-	2	Pergantian Kepala Balai	Konfirmasi untuk penandatanganan ulang dokumen Perjanjian Kinerja oleh Kabalai (Ir. Stenly Imanuel Tangkere, S.T., M.A.P.) dan Kasatker (Ir. Ferry Moya, S.T.)
RKA/KL						
-	-	-	-	1	Terdapat revisi pemotongan anggaran di 3 DIPA (Kawasan Permukiman, Perdesaan, Perkotaan).	Sudah dilakukan revisi dan pengiputan pada SAKTI 3 DIPA (Kawasan Permukiman, Perdesaan, Perkotaan).
-	-	-	-	2	Terdapat revisi POK dan RPD (Rencana Penarikan Dana) pada 4 DIPA Satker.	Sudah dilakukan revisi dan pengiputan pada SAKTI POK dan RPD (Rencana Penarikan

Triwulan I				Triwulan II		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
						Dana) pada 4 DIPA Satker.
BMN						
1	Ditemukan ketidaksesuaian antara data pencatatan kondisi barang BMN di neraca di aplikasi sakti dengan kondisi riil aset di lapangan.	Membentuk Tim Inventarisasi BMN dan Pelaksanaan Inventarisasi aset BMN terkait penyesuaian data pencatatan kondisi barang BMN di neraca di aplikasi sakti dengan kondisi riil aset di lapangan.	Adanya dokumen SK Penetapan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)	1	Dokumen Serah Terima penghunian dan Serah Terima Aset Rumah Susun ASN Pemerintah Provinsi Papua Barat daya yang belum lengkap.	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Percepatan Penghunian dan Serah Terima Aset Rumah Susun ASN Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
-	-	-	-	2	Surat Kesiapan Menerima Hibah dari Penerima Batuan Eks. DJP harus di tanda tangan ulang dengan tujuan Hibah kepada Kementerian PKP.	Menunggu surat dari Sekjen terkait permintaan SKM dari Kementerian PKP sebagai dasar pengajuan tanda tangan ulang ke Penerima Hibah/ Pemda serta menunggu arahan dari pimpinan Kasatker tuk menindaklanjuti surat tersebut.
PPK RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS						
-	-	-	-	1	Kelengkapan dokumen penghunian Rumah Susun ASN PUPR belum dilengkapi oleh user, sehingga Rumah Susun belum terhuni.	Balai bersurat ke Kepala Balai BWS Wilayah Papua Barat untuk segera melengkapi dokumen, deadline 6 Mei 2026
-	-	-	-	2	Kelengkapan dokumen penghunian Rumah Susun ASN Pemprov PBD belum dilengkapi oleh user, sehingga Rumah Susun belum terhuni.	Balai bersurat ke Gubernur Provinsi Papua Barat Daya untuk segera melengkapi dokumen, deadline 6 Mei 2026.

Triwulan I				Triwulan II		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
PPK RUMAH SWADAYA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN						
BSPS						
1	Instruksi verifikasi tahap I (436 BNBA), Instruksi verifikasi tahap II (603 BNBA) dan Instruksi verifikasi tahap III (776 BNBA) total 1.815 BNBA proses vertek lapangan belum optimal mengingat vertek lapangan baru 874 BNBA dan baru menghasilkan data Memenuhi Syarat 260 BNBA.	Mendorong Tim Verifikasi dan Pengawasan (Kasie I & Kasie II Balai P3KP Papua II) dalam pelaksanaan vertek lapangan melalui pengurangan keterlibatan staf Balai & Satker, dan penugasan dialihkan ke TFL dan Korkab hasil seleksi/rekrutmen (24 Februari 2026) serta Rekrutmen Tambahan TFL.	Adanya Surat Tugas Tim Verifikasi Teknis Lapangan, Berita Acara Hasil Rekrutmen Calon Fasilitator BSPS dan SK Penugasan serta Dokumen Kontrak Fasilitator Lapangan	1	Instruksi Verifikasi Tahap I, II, III, dan V mencakup sebanyak 1.816 BNBA. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.374 BNBA telah selesai dilakukan verifikasi teknis lapangan (vertek), sebanyak 309 BNBA masih dalam proses verifikasi, sehingga total capaian verifikasi mencapai 1.683 BNBA. Namun demikian, data yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) baru mencapai 466 BNBA (Tahap I sebanyak 156 BNBA, Tahap II sebanyak 99 BNBA, dan Tahap III sebanyak 211 BNBA) atau sebesar 25,66% dari total 1.816 BNBA. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian validasi data belum optimal karena masih terdapat data yang terindikasi sebagai dummy.	Mendorong penguatan sinergi dan koordinasi di tingkat kabupaten/kota, khususnya antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Dinas Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS), guna memperoleh data yang valid serta mempercepat penyelesaian verifikasi teknis lapangan (vertek). Upaya tersebut didukung melalui pelaksanaan rapat internal mingguan untuk mengekspos hasil vertek, rapat koordinasi mingguan bersama Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Koordinator Kabupaten (Korkab), serta evaluasi kinerja secara berkala guna memastikan pencapaian target pelaksanaan kegiatan.
2	Tahapan verifikasi teknis CPB BSPS TA.2026 masih berlangsung dan dalam proses pelaksanaan untuk Tahap 2 dan Tahap 3, dan belum dapat dinyatakan selesai secara keseluruhan	Mempercepat proses verifikasi teknis dengan mengarahkan seluruh tim verifikasi ke lapangan.	Adanya Surat Tugas Tim Verifikasi Teknis Lapangan	2	Data CPB yang direkomendasikan untuk program BSPS hanya 1.190 dari total instruksi verifikasi sebanyak 4.340 CPB.	Berkoordinasi dengan pengusul terkait pemenuhan alokasi instruksi verifikasi.

Triwulan I				Triwulan II		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
	di laman https://go.pkp.go.id/ .					
-	-	-	-	3	Adanya kekurangan TFL untuk menyelesaikan verifikasi CPB.	Perekrutan kembali tenaga fasilitator lapangan.
					Adanya keterlambatan pada proses pelaksanaan sosialisasi dan pemilihan toko.	Berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait percepatan pelaksanaan Program BSPS
PSU						
1	Terdapat pergeseran bangunan perumahan antara di <i>Siteplan</i> dengan yang ada di lapangan pada perumahan Griya Andai di Kabupaten Manokwari, dan telah mendapat bantuan PSU jalan lingkungan sebanyak 4 (empat) kali di lokasi yang sama dengan total daya tampung 200 unit.	Perumahan Griya Andai tidak berpotensi mendapatkan bantuan PSU TA.2026 untuk jalan lingkungan karena telah menerima bantuan PSU untuk jalan lingkungan sebelumnya sebanyak 4 (empat) kali di lokasi yang sama dengan total daya tampung 200 unit.	Ekspos hasil verifikasi administrasi dan verifikasi teknis usulan bantuan PSU TA.2026 Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya	1	Terdapat ketidaksesuaian dalam persyaratan administrasi sesuai dengan SE no 02/DT/ 2025 pada perumahan Soribo Gunung yaitu SBU jasa Konstruksi yang sudah habis masa berlakunya, daftar tahun akad yang belum lengkap.	Terus menginstruksikan pengembang untuk melengkapi dokumen administrasi yang belum lengkap pada Perumahan Soribo Gunung.
2	Kurangnya dokumen administrasi brosur penjualan yang belum dicap oleh pengembang pada perumahan Soribo Gunung di Kabupaten Manokwari	Segera menginstruksikan pengembang untuk melengkapi dokumen administrasi yang belum dilengkapi	Terlengkapinya dokumen administrasi brosur penjualan yang sudah dicap oleh pengembang			
3	Terdapat ketidaksesuaian data daya tampung perumahan antara di dokumen <i>Siteplan</i> dan di lapangan dengan data usulan pengembang, dan brosur penjualan yang belum dicap oleh	Segera menginstruksikan pengembang untuk menyesuaikan data daya tampung antara di <i>Siteplan</i> dengan data usulan pengembang, serta melengkapi	Menyediakan format dokumen PSU guna membantu pengembang melengkapi dokumen administrasinya			

Triwulan I				Triwulan II		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
	pengembang pada perumahan Sogun Permai 6 di Kabupaten Manokwari	dokumen administrasi yang belum lengkap				
PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH						
1	Menunggu SK Penetapan Lokasi Dirjen Kota	Melakukan Verifikasi Sambil menunggu SK Penetapan Lokasi Dirjen Perkotaan	Dokumentasi pelaksanaan Verifikasi Teknis Lapangan	1	Revisi DED usulan Pemda.	Mengarahkan dinas melakukan revisi sesuai Juknis.
2	Belum lengkapnya dokumen pengajuan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kota Sorong Kecamatan Sorong Manoi Desa Malawei (15,04 ha) yang diajukan oleh Pemerintah Kota Sorong di laman http://www.sibaru.pkp.go.id .	Mengadakan rapat pembahasan hasil verifikasi administrasi dan teknis usulan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kota Sorong Kecamatan Sorong Manoi Desa Malawei (15,04 ha)	Dokumentasi pelaksanaan rapat pembahasan hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Teknik terkait usulan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	2	Adanya keterlambatan penyusunan dokumen reuiu DED penanganan kawasan kumuh oleh konsultan.	Pemberian surat peringatan kepada konsultan reuiu DED.

III

Daftar Peserta Lulus Sekolah Fasilitas Program BPJS Kak. Manokwari TA 2020										
No	NAMA PESERTA	KAMPUS	KELOMPOK	KELOMPOK KAWALAN	Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5	KETERANGAN
1	Aras Supriyanti Pongia	Kab. Manokwari	Lainland	Indonesian Education	100	80,00	70,00	70,00	80,00	LULUS
2	Arifin Nuzuliyah Supriyanti	Kab. Manokwari	Pemangasan	Pemangasan	100	87,00	73,00	70,00	80,00	LULUS
3	Arwani Yustinus Sidi	Kab. Manokwari	Lainland	Pemangasan	100	82,00	73,00	70,00	80,00	LULUS
4	Arifin Nurulnisa	Kab. Manokwari	Lainland	Pemangasan	100	70,00	70,00	80,00	80,00	LULUS
5	Arifin Nurulnisa	Lainland	Lainland	Pemangasan	100	72,00	70,00	70,00	70,00	100% LULUS (KAWALAN DAN KAWALAN BELUM LULUS)
6	Arifin Nurulnisa	Kab. Manokwari	Pemangasan	Pemangasan	100	71,00	72,00	70,00	70,00	LULUS (KAWALAN DAN KAWALAN BELUM LULUS)
7	Arifin Nurulnisa	Kab. Manokwari	Lainland	Siswa	100	81,00	80,00	80,00	80,00	LULUS
8	Arifin Nurulnisa	Kab. Manokwari	Pemangasan	Siswa	100	82,00	70,00	70,00	80,00	LULUS
9	Arifin Nurulnisa	Kab. Manokwari	Siswa	Siswa	100	80,00	80,00	80,00	80,00	LULUS
10	Arifin Nurulnisa	Kab. Manokwari	Siswa	Siswa	100	70,00	70,00	80,00	80,00	LULUS (KAWALAN DAN KAWALAN BELUM LULUS)
11	Arifin Nurulnisa	Kab. Manokwari	Pemangasan	Siswa	100	77,00	70,00	80,00	80,00	LULUS (KAWALAN DAN KAWALAN BELUM LULUS)
12	Arifin Nurulnisa	Kab. Manokwari	Lainland	Siswa	100	70,00	70,00	80,00	80,00	LULUS (KAWALAN DAN KAWALAN BELUM LULUS)
13	Arifin Nurulnisa	Kab. Manokwari	Pemangasan	Siswa	100	70,00	70,00	80,00	80,00	LULUS (KAWALAN DAN KAWALAN BELUM LULUS)
14	Arifin Nurulnisa	Kab. Manokwari	Pemangasan	Siswa	100	80,00	80,00	80,00	80,00	LULUS (KAWALAN DAN KAWALAN BELUM LULUS)
15	Arifin Nurulnisa	Kab. Manokwari	Lainland	Siswa	100	80,00	80,00	80,00	80,00	LULUS (KAWALAN DAN KAWALAN BELUM LULUS)

Daftar Peserta Lulus Seleksi Fasilitas Program BPS Kab. Manokwari Selatan TA 2021

NO	NAMA LENGKAP	KABUPATEN DOMBIL	JENIS KELAMIN	JENIS PENDAFTARAN	NILAI ADMINISTRASI	NILAI TIK	NILAI MANAJEMEN	NILAI AKHIR	KETERANGAN
TIDAK ADA PESERTA YANG LAJUS SELEKSI									

Daftar Peserta Lulus Seleksi Facilitator Program BSPS Kab. Fakfak TA 2026

NO	NAMA LOKASI	KATEGORI LOKASI	JUMLAH LOKASI	JENIS PERUBAHAN	WAKTU PERUBAHAN	WAKTU TTD	WAKTU RENCANA	REKAMAJUKU
1	Indragiri	Kab. Pailan	Pemukiman	Pembangunan	100	90,00	77,00	82,00
2	Sungai Liris	Kab. Pailan	Pemukiman	Pembangunan	100	80,00	68,00	69,00
3	Jambi Rantaubaru	Kab. Pailan	Pemukiman	Pembangunan	100	70,00	70,00	80,00
4	Sungai Kiri	Kab. Pailan	Lingkungan	Pembangunan	100	80,00	69,00	69,00
5	Yasid	Kab. Pailan	Pemukiman	Pembangunan	100	70,00	69,00	70,00
6					100	70,00	69,00	70,00

Daftar Peserta Lulus Seleksi Fasilitator Program BSPS Kab. Teluk Bincuni TA 2020

NO	NAMA LENGKAP	KARIBUNTEN DOMESTIC	JENIS KELAMIN	JENIS PENDAFTARAN	NIK AMANAHTRA	NIK TID	NIK MANASSAMA	NIK AGENT	KETERANGAN
1	Iskharis Paturungan	Kal. Mbu Buntok	Laki-laki	Koordinator Kabupaten	190	75,00	80,00	75,00	UA,US
2	Melissa Perung	Kal. Mbu Buntok	Pemempuan	Pembendahar	190	80,00	75,00	80,00	UA,US
3	Abdul Ghasyus Siregar	Kal. Mbu Buntok	Laki-laki	Sepele	190	40,00	50,00	50,00	UA,US

Daftar Peserta Lulus Seleksi Fasilitas Program BPS Kab. Kalimantan TA 2021

NO	Isiada / Location	Geographical Coordinates	Area (km ²)	Forest Progam/Type	Relig. Affiliation	Relig. Income	Relig. Assets	Waterways
1	Indah Bana	Klat, Klaten	Lirisiki	Kandakara Pektan	100	71,200	73,800	Lirisiki
2	Mantri / H. S. P.	Klat, Klaten	Lirisiki		100	78,000	82,000	Lirisiki / H. S. P.
3	Indah Bana	Klat, Klaten	Pektan	Pektan	100	85,000	78,000	Lirisiki / H. S. P.
4	Indah Bana	Klat, Klaten	Pektan	Pektan	100	80,000	82,000	Lirisiki / H. S. P.
5	Indah Bana	Klat, Klaten	Lirisiki	Pektan	100	77,000	80,000	Lirisiki / H. S. P.
6	Indah Bana	Klat, Klaten	Lirisiki	Tanah	100	80,000	80,000	Lirisiki / H. S. P.

Daftar Peserta Lulus Seleksi Fasilitas Program BSPS Kab. Teluk Wondama TA 2022

NO	NAMA LENGKAP	KARIPUTAN DOMBLI	JENIS KELAMIN	JENIS PENDAPTAHAN	NIK KEMAHOTAN	NIK TTD	NIK BANJARBARA	NIK AGRES	KETERANGAN
1	ENJ Zaky Sengul	NIK, Negeri Wadanka	Laki-laki	Pendaftaran	100	75.00	07.00	75.10	UA.05
2	Yusuf Sani	NIK, Negeri Wadanka	Laki-laki	Pendaftaran	100	00.00	00.00	70.00	UA.06

Daftar Peserta Lulus Seleksi Fasilitas Program BPS Kab Pegunungan Arfak TA 2024

NO	NAMA LENGKAP	KABUPATEN DOMBLU	JENIS KELAMIN	JENIS PENDAFTARAN	NILAI AKADABRASI	NILAI TIK	NILAI MANAJEMEN	NILAI AGRES	KETERANGAN
1	Dumboum A. Khawir	Sak Domboum A. Khawir	Domboum	Domboum	100	75,00	80,00	75,00	100,00 MENANGG

Daftar Peserta Lulus Seleksi Fasilitator Program BSPS Kota Sorong TA 2020[illegible]

Daftar Peserta Lulus Seleksi Fasilitas Program BSPPS Kab. Sorong TA 2026									
NO	NAMA LENGKAP	KABUPATEN DOMISILI	JENIS KELAMIN	JENIS PENDAFTARAN	NILAI ADMINISTRASI	NILAI TSD	NILAI MANAJEMEN	NILAI AKHIR	KETERANGAN
1	Idenengy Bar Bar	Kab. Sorong	Laki-laki	Pembayaran	100	85,00	81,00	78,50	LULUS
2	Iden Iden Kanto	Kab. Sorong	Laki-laki	Pembayaran	100	85,00	85,00	85,00	LULUS
3	Pemadani Kanto	Kab. Sorong	Pemampuan	Pembayaran	100	81,00	85,00	77,50	LULUS MENUNGGU ALOKASI
4	Hipmat Kanto	Kab. Sorong	Laki-laki	Pembayaran	100	75,00	85,00	75,00	LULUS MENUNGGU ALOKASI

Daftar Peserta Lulus Seleksi Fasilitas Program BSPPS Kab. Sorong Selatan TA 2026									
NO	NAMA LENGKAP	KABUPATEN DOMISILI	JENIS KELAMIN	JENIS PENDAFTARAN	NILAI ADMINISTRASI	NILAI TSD	NILAI MANAJEMEN	NILAI AKHIR	KETERANGAN
1	Arifan Marbut	Kab. Sorong Selatan	Laki-laki	Pembayaran	100	75,00	85,00	82,50	LULUS MENUNGGU ALOKASI
2	Haris QIR Marbut	Kab. Sorong Selatan	Laki-laki	Pembayaran	100	87,00	71,00	77,50	LULUS MENUNGGU ALOKASI
3	Donat Dudi	Kab. Sorong Selatan	Laki-laki	Pembayaran	100	75,00	85,00	75,00	LULUS MENUNGGU ALOKASI
4	Jani Janti	Kab. Sorong Selatan	Pemampuan	Teknik	100	81,00	71,00	75,00	LULUS MENUNGGU ALOKASI

Daftar Peserta Lulus Seleksi Fasilitas Program BSPPS Kab. Tambora TA 2026									
NO	NAMA LENGKAP	KABUPATEN DOMISILI	JENIS KELAMIN	JENIS PENDAFTARAN	NILAI ADMINISTRASI	NILAI TSD	NILAI MANAJEMEN	NILAI AKHIR	KETERANGAN
1	Juanita Neta	Kab. Jayapura	Pemampuan	Pembayaran	100	75,00	81,00	80,50	LULUS MENUNGGU ALOKASI
2	Arifan Tapani	Kab. Sorong	Laki-laki	Pembayaran	100	75,00	85,00	75,00	LULUS MENUNGGU ALOKASI

Daftar Peserta Lulus Seleksi Fasilitas Program BSPPS Kab. Raja Ampat TA 2026									
NO	NAMA LENGKAP	KABUPATEN DOMISILI	JENIS KELAMIN	JENIS PENDAFTARAN	NILAI ADMINISTRASI	NILAI TSD	NILAI MANAJEMEN	NILAI AKHIR	KETERANGAN
1	Lusiana Sandra Masada	Kab. Sorong	Pemampuan	Pembayaran	100	81,00	84,50	80,15	LULUS
2	Demak Wikan Wika	Kab. Raja Ampat	Laki-laki	Pembayaran	100	83,00	78,00	77,45	LULUS MENUNGGU ALOKASI
3	Aranda Phantana	Kab. Raja Ampat	Laki-laki	Teknik	100	87,00	85,50	81,65	LULUS MENUNGGU ALOKASI

(Pengumuman Hasil Rekrutmen Fasilitas BSPPS 2026)

Lampiran II. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

PERUMAHAN GRIYA ANDAI
Andai, Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Papua Bar.

DATA UMUM

PERUMAHAN
PT. PULCALAND
KORPORASI
800
DATA TAMPAK (UNIT)
401
MASUK BANTUAN (UNIT)
100 Unit (Sesuai dari jumlah Unit)
PERMAN MENYERAH BANTUAN (UNIT)
Tahun 2020,2021,2022,2024 (202 Unit)
TERBANGKUN MENYERAH TIBAKAT (UNIT)
271
PROSES PEMBANGUNAN (UNIT)
UGULAN BANTUAN
JALAN BETON

PERUMAHAN GRIYA ANDAI
FORM VERIFIKASI ADMINISTRASI

DATA UMUM

PERUMAHAN
PT. PULCALAND
KORPORASI
800
DATA TAMPAK (UNIT)
401
MASUK BANTUAN (UNIT)
100 Unit (Sesuai dari jumlah Unit)
PERMAN MENYERAH BANTUAN (UNIT)
Tahun 2020,2021,2022,2024 (202 Unit)
TERBANGKUN MENYERAH TIBAKAT (UNIT)
271
PROSES PEMBANGUNAN (UNIT)
UGULAN BANTUAN
JALAN BETON

PERUMAHAN GRIYA ANDAI
BUKTI DUKUNG VERIFIKASI ADMINISTRASI

SURAT PERMOHONAN USULAN BANTUAN PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN TAPAK

SURAT PERNYATAAN DALAM PERMOHONAN BANTUAN PEMBANGUNAN PSU

SURAT PERNYATAAN PENDA

PERUMAHAN GRIYA ANDAI
BUKTI DUKUNG VERIFIKASI ADMINISTRASI

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN

NOMOR INDIK BERUSAHA (NIB)

SBU JASA KONSTRUKSI

PERUMAHAN GRIYA ANDAI
BUKTI DUKUNG VERIFIKASI ADMINISTRASI

SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH

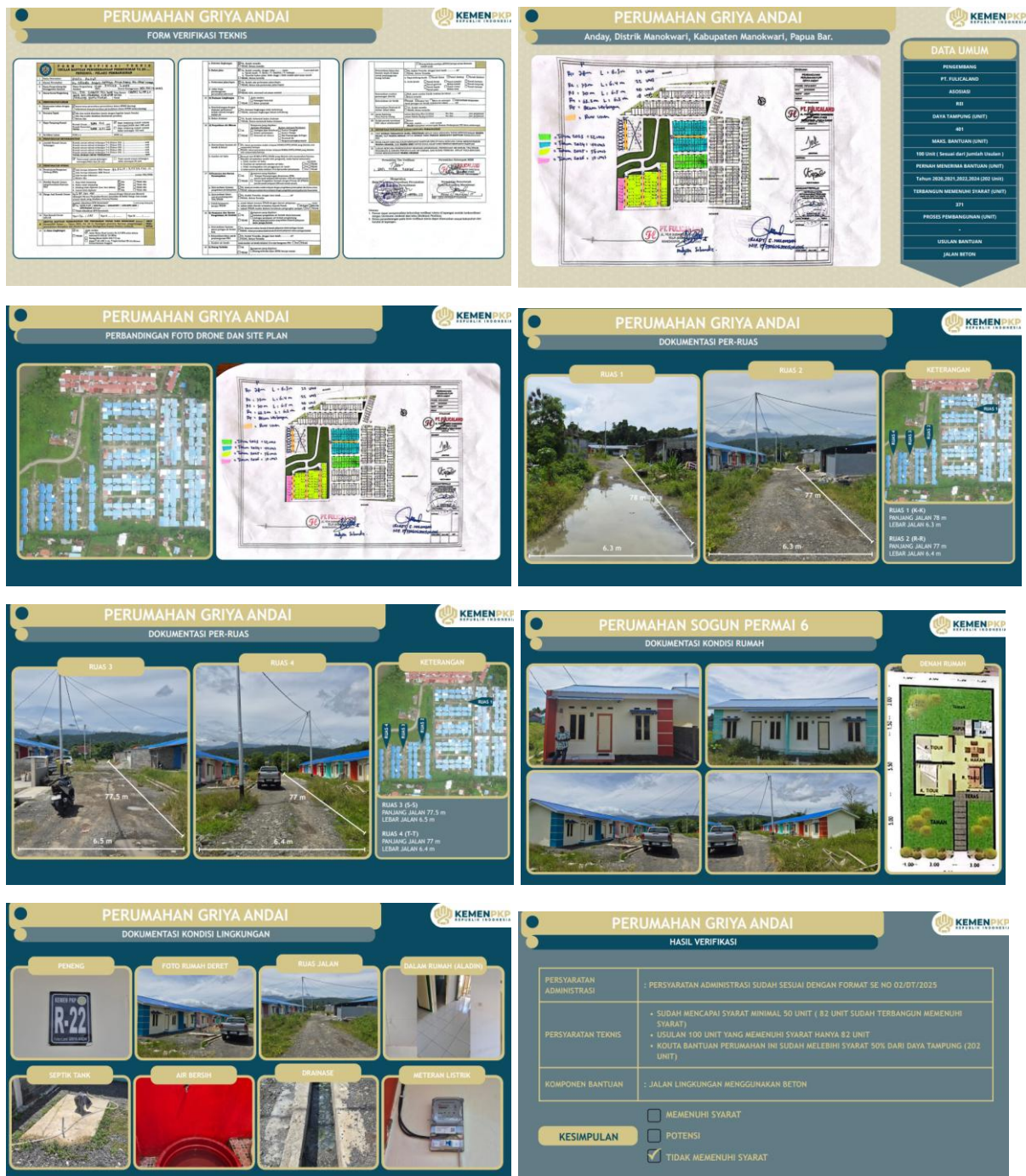
RENCANA TAPAK

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG/IMB

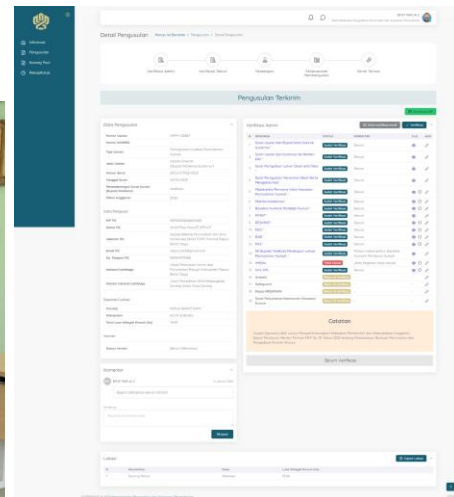
PERUMAHAN GRIYA ANDAI
BUKTI DUKUNG VERIFIKASI ADMINISTRASI

DAFTAR TAHUN AKAD

BROSUR PENJUALAN



(Ekspos Hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Teknis Perumahan Griya Andai)



(Dokumentasi pelaksanaan rapat pembahasan hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Teknik)

Lampiran IV. Barang Milik Negara

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR : 29/KPTS/BJP/19.4/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN PROVINSI
PAPUA BARAT**

KEPALA SATUAN KERJA

Membaring

1. bahwa untuk menjamin transparansi, akuntabilitas dan optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dibentuk Tim Inventarisasi melalui kegiatan inventarisasi;
2. bahwa untuk melaksanakan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Inventarisasi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Campak;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Inventarisasi Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara.

Mengingat

1. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Rencana Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Kementerian/Instansi Tahun 2024 Nomor 245;
2. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lambatan Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 235);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Perubahan dan Pelaporan Dalam Rangka Pemertan, Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK/2021 tentang Pemertan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1517);
5. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1595).

MERUTUKAN:

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN
PROVINSI PAPUA BARAT**

KESATU

Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat dengan struktur, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut:

KEDUA

Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan secara berkala pelaksanaan inventarisasi;
2. Mengumpulkan dokumen sumber;
3. Melakukan penjabaran pelaksanaan inventarisasi (BMN, bentuk fisik);
4. Melakukan BMN;
5. Melakukan Tim Inventarisasi berdasarkan daftar lokasi;
6. Menyusun daftar kerja inventarisasi beserta cara pelaksanaannya;

3. Tugas Pelaksanaan

- 1) Penetapan
 - a) Menghitung jumlah barang;
 - b) Meneliti kondisi barang (baik, rusak ringan, rusak berat);
 - c) Menentukan jenis barang berdasarkan kondisi barang;
 - d) Meneliti selengkap-lengkap barang dengan mendokumentasikan data hasil inventarisasi (BMN dan data awal dokumen sumber);
 - e) Menyusun laporan hasil inventarisasi; dan
 - f) Menyusun laporan hasil inventarisasi; dan
- 2) Barang berwujud
 - a) Meneliti bentuk, ukuran, dan jumlah barang dalam kategori;
 - b) Menyusun daftar barang inventarisasi;
 - c) Menyusun Daftar Barang Inventarisasi;
 - d) Menyusun Daftar Barang Inventarisasi;
 - e) Menyusun Daftar Barang Inventarisasi;
 - f) Menyusun Daftar Barang Inventarisasi;
 - g) Menyusun Daftar Barang Inventarisasi;
 - h) Menyusun Daftar Barang Inventarisasi;
 - i) Menyusun Daftar Barang Inventarisasi;
 - j) Menyusun Daftar Barang Inventarisasi;
 - k) Menyusun Daftar Barang Inventarisasi;
 - l) Menyusun Daftar Barang Inventarisasi;
 - m) Menyusun Daftar Barang Inventarisasi;
 - n) Menyusun Daftar Barang Inventarisasi;
 - o) Menyusun Daftar Barang Inventarisasi;
 - p) Menyusun Daftar Barang Inventarisasi;
 - q) Menyusun Daftar Barang Inventarisasi;
 - r) Menyusun Daftar Barang Inventarisasi;
 - s) Menyusun Daftar Barang Inventarisasi;
 - t) Menyusun Daftar Barang Inventarisasi;
 - u) Menyusun Daftar Barang Inventarisasi;
 - v) Menyusun Daftar Barang Inventarisasi;
 - w) Menyusun Daftar Barang Inventarisasi;
 - x) Menyusun Daftar Barang Inventarisasi;
 - y) Menyusun Daftar Barang Inventarisasi;
 - z) Menyusun Daftar Barang Inventarisasi;

KETUA

Masa tugas Tim Inventarisasi ditetapkan berlaku sampai dengan 18 Juni 2026 dan dapat diperpanjang jika diperlukan.

KESIMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 11 Maret 2026

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Papua Barat


H. HENDRIK S. S. T.
NIP. 19710210125191211 1 001

Tembusan

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Direktur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUP;

**TM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN
PROVINSI PAPUA BARAT**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. Ferry Moya, S.T.	Ketua
2.	Rahmawati Widiyati, S.E.	Anggota
3.	Ray Deme Samuel Siregar, S.T.	Anggota
4.	Rahmawati Widiyati, S.T.	Anggota
5.	Daniel Dany, S.T.	Anggota
6.	Oscar Yohari S. Kinar, S.T.	Anggota
7.	Anggie Mero Gumbung, S.T.	Anggota
8.	Sugarto Mendo, S.T.	Anggota

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Papua Barat


H. HENDRIK S. S. T.
NIP. 19710210125191211 1 001

(SK Penetapan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN))



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA II